

OMBUDSMAN KEPRI MINTA PENGELOLA BANDARA HANG NADIM BATAM PERKUAT KOORDINASI SELAMA MUDIK

Kamis, 04 April 2024 - kepri

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Ombudsmam RI Perwakilan Kepri meminta PT Bandara Internasional Batam (BIB) agar meningkatkan koordinasi dengan sejumlah instansi terkait yang ada di sana.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kepri, Lagat Siadari menilai koordinasi ini penting agar pelayanan kepada calon penumpang mudik lebaran 2024.

Ia mencontohkan, jika imigrasinya tidak baik maka yang namanya tidak baik pasti bandaranya.

"Jadi pastikan karena ini merupakan bandara internasional maka pelayanannya juga harus bertaraf internasional meskipun untuk penerbangan domestik," ucap Lagat, Kamis (4/4).

Ia mengatakan Ombudsman RI Perwakilan Kepri akan terus melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan arus mudik lebaran tahun 2024 serta mengajak masyarakat turut andil mengawasi.

Saat ini, jajaran lintas stake holder telah mendirikan posko terpadu di pintu kedatangan bandara Batam. Posko itu menjadi sentral pelayanan untuk arus mudik berangkat dan datang.

"Sampaikan jika keluhan pada penyelenggara pelabuhan maupun bandara, jika tidak ditanggapi maka silahkan laporkan kepada Ombudsman RI Perwakilan Kepri melalui WA Pengaduan kami di 08119813737," tutur Lagat.

Ombudsman RI Perwakilan Kepri sebelumnya mengecek langsung Pelabuhan Batuampar Batam.

Mereka menyoroti infrastruktur yang kurang layak pada Pelabuhan Penumpang Pelni Batuampar Batam.

Sesudah melakukan pengawasan dan pemantauan terkait persiapan arus mudik lebaran tahun 2024, Ombudsman memberi sejumlah catatan mengenai sejumlah infrastruktur.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kepri, Lagat Paroha Patar Siadari saat dijumpai di Pelabuhan Penumpang Pelni

Batuampar mengungkap, standar kelayakan yang kurang menjadi atensinya.

"Berdasarkan temuan tahun kemarin yang sudah kami sampaikan kepada BP Batam memang hanya sedikit saja perubahan. Kalau kita lihat tenda disebelah jalur masuk masih kurang. Terlihat ada beberapa ibu dan anak yang tidak berada di bawah tenda padahal kan ini lagi puasa juga kan," ujar Lagat Paroha kepada TribunBatam.id, Rabu (3/4/2024).

Menurutnya, pendirian tenda menjadi hal penting mengingat setiap kali keberangkatan pasti ada lebih kurang 3.000 hingga 4.000 penumpang yang mengantre.

Tak hanya itu, terbatasnya keberadaan toilet umum menjadi temuan kedua yang menjadi sorotan.

"Tukar tiket sudah antre, mau masuk toilet aja harus mengantre. Toilet yang disediakan cuma 4, mudah-mudahan ada penambahan toilet portabel diluar sini," kata Lagat lagi.

Ia juga menyoroti keberadaan ruang tunggu yang belum menggunakan pendingin ruangan yang memadai.

"Alhamdulillah meski sudah ada perubahan sedikit, meski ada penambahan ac namun menurut saya itu masih kurang. Kalau penumpang sedikit okelah masih dingin, tapi kalau sudah ramai panasnya terasa, mungkin nanti bisa nanti ada penambahan 2-3 pendingin suhunya cukup," imbuhnya.

Ia juga menyayangkan tidak adanya parkir yang luas untuk para penumpang atau keluarga yang mengantarkan, drop off penumpang pun juga terkesan terlalu didepan hingga membuat pintu masuk terlihat menumpuk dan semrawut.

Tidak hanya temuan yang perlu ditambahkan, namun ada beberapa perubahan yang dilakukan BP Batam dan Pelni untuk memaksimalkan fasilitas pelayanan publik.

"Bus yang drop ping dari pelabuhan ini ke kapal bertambah 5 bus, mobilitas penumpang bisa lebih cepat dari pelabuhan ke kapal pelni. Tentu mengurangi sedikit penderitaan penumpang," katanya.

Selain itu, fasilitas kesehatan juga terpantau berjalan baik sesuai operasional, dan petugas kesehatan juga telah bersiap penjagaan sewaktu-waktu ada keluhan sakit oleh penumpang.

"Kalau untuk pelayanan penukaran tiket sudah baik. Selama pengawasan juga belum kami temukan kegaduhan," jelas Lagat.

Meski pelabuhan penumpang Pelni rencananya akan dipindahkan ia berharap kepada pihak Pelni dan BP Batam untuk terus melakukan upaya perbaikan berdasarkan catatan utama dan setiap tahun dari Ombudsman Kepri.

Pihaknya terus menekankan semoga kedepannya ada upaya perbaikan agar pelabuhan tersebut dapat sesuai dengan standar kelayakan pelabuhan penumpang.